

**PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK SEBAGAI
ALTERNATIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI MENUJU INDONESIA BEBAS KORUPSI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENUJU INDONESIA BEBAS KORUPSI

Disusun Oleh

DWI PRAMONO

NIM. 201902008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 30 Agustus 2021

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Dr. Dra. Suliasworo, S.H., M.C.N.
NIS/NIP. 0610701000001268

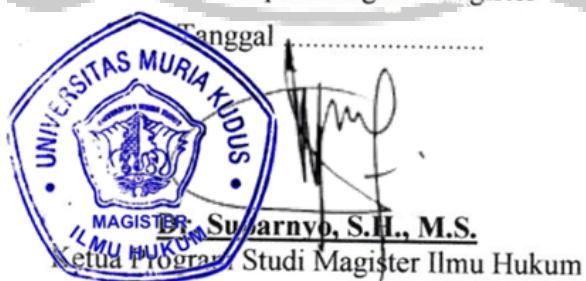
Anggota Dewan Penguji I

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIS/NIP. 0610701000001007

Anggota Dewan Penguji II

Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.
NIS/NIP. 195506011983031002

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan
Allah.

(HR.Turmudzi)

Don't be afraid to make a mistake. But make sure you don't make the same mistake twice.

(Aiko Morita)

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Seluruh keluarga besarku.
2. Sahabat seperjuanganku semuanya
3. Almamaterku.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI PRAMONO

NIM : 201902008

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Sebagai Alternatif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menuju Indonesia Bebas Korupsi”. Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

Segala keterbatasan yang ada pada penulis, penulis juga menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan, dan kerjasama yang baik dari beberapa pihak tidaklah mungkin dapat terselesaikan penulisan tesis ini, sehingga dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati perkenanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaiannya penulisan tesis:

1. Bapak Prof. Dr Ir Darsono MSi., selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
3. Bapak Dr. Suparnyo, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus
4. Keluargaku yang telah memberikan do'a serta dorongan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari

semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kudus,

2021

Penulis,

DWI PRAMONO



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAKS	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	23
B. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.....	32
C. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya	43

D. Tinjauan Umum Terhadap Pembuktian.....	46
E. Tinjauan Umum Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	53
F. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	58
G. Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	60
H. Negara Bebas Korupsi	62
I. Mewujudkan Negara Bebas Korupsi	65
J. Teori Hukum.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Model Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi.....	71
B. Penerapan Model Beban Pembuktian Terbalik Diharapkan Dapat Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi.....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Simpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2015-2019..	2
Tabel 2. Rata-rata Hukuman Koruptor Tahun 2016-2019.....	5
Tabel 3. Penelitian Sebelumnya.....	10
Tabel 4. Hasil Penelitian Model Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi	82
Tabel 5. Hasil Penelitian Penerapan Model Beban Pembuktian Terbalik Diharapkan Dapat Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi.....	89

PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENUJU INDONESIA BEBAS KORUPSI

Dwi Pramono¹, Sulistyowati²

Universitas Muria Kudus

Dwi Pramono @umk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dengan Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Sebagai Alternatif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menuju Indonesia Bebas Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan masalah besar, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik dan bahkan merusak nilai-nilai demokrasi dan moral karena semakin lama menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita keinginan masyarakat yang adil dan makmur.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non doktrinal atau yuridis empiris. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara. Pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara meminta atau memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh secara sah, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi. Beban pembuktian terbalik merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh pihak kejaksanaan dalam mengungkap dan memberantas kasus-kasus korupsi yang ada

Kata kunci : beban pembuktian terbalik, tindak pidana, korupsi

¹ Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

² Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

APPLICATION OF THE LOAD OF REVERSE EVIDENCE AS AN ALTERNATIVE TO ERADICATION OF CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION TOWARDS A CORRUPTION-FREE INDONESIA

Dwi Pramono³, Sulistyowati⁴
Universitas Muria Kudus
Dwi Pramono@umk.ac.id

ABSTRACT

This research uses the application of the burden of reverse evidence as an alternative to the eradication of criminal acts of corruption towards a corruption-free Indonesia. Corruption is a big problem, because it can endanger the stability and security of the state and society, endanger the social, economic and political development of the community and even damage democratic and moral values because it becomes a culture and a threat to the ideals of a just and prosperous society. .

The approach method used in this research is non-doctrinal or juridical empirical. In the preparation and writing of this thesis, one of the research specifications will be used, namely analytical descriptive. The approach method used is an empirical juridical approach, so the data collected comes from primary data as primary data and secondary data as supporting data. To classify primary data, data collection was carried out in two ways, namely observation and interviews. In discussing this thesis, the author uses qualitative analysis methods.

The results of this study indicate that the model of applying the reverse burden of proof on corruption is done by asking or ordering the defendant to prove that his property was legally obtained, if the defendant cannot prove that the property was obtained not because of a criminal act of corruption, the property is considered to have been obtained. as well as from corruption. The reversed burden of proof is one of the alternatives that can be used by the prosecutor's office in uncovering and eradicating existing corruption cases

Keywords: *reversed burden of proof, crime, corruption*

³ Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus